



MODEL PEMBERDAYAAN LOKAL DALAM PARIWISATA NUSA PENIDA

Prof. Dr. Drs. I Made Sumada, M.M., M.Si

MODEL PEMBERDAYAAN LOKAL DALAM PARIWISATA NUSA PENIDA

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nusa Penida, berdasarkan teori Charles O. Jones, menunjukkan efektivitas yang cukup baik melalui tiga aspek utama; organisasi, sumber daya, dan metode. Struktur kelembagaan berjalan fungsional, partisipasi masyarakat tinggi, dan metode partisipatis mendorong kemandirian warga. Masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan wisata, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, khususnya akses jalan.

Komunikasi yang baik antara pelaksana dan penerima kebijakan menjadi faktor pendukung keberhasilan. Untuk memperkuat dampak kebijakan, dibutuhkan peningkatan sarana-prasarana dan sinergi antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan ini layak dijadikan inspirasi untuk diterapkan di berbagai wilayah lain yang tengah mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas, sehingga model pemberdayaan lokal dalam pengelolaan pariwisata di Nusa Penida dapat menjadi rujukan penting bagi peneliti, pembuat kebijakan dan masyarakat umum.



Penerbit
GALUH PATRIA
Jl. Kaliagir Lor No. 18
Rt. 02/11, Kalitirto, Berbah
Sleman, D.I. Yogyakarta
HP: 0822-6555-0883
www.galuhpatria.id
penerbitgaluhpatria@gmail.com

ISBN: 978-623-8454-65-5



9 786238 454655



Prof. Dr. Drs. I Made Sumada, M.M., M.Si

Model Pemberdayaan Lokal dalam Pariwisata Nusa Penida

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.0000 (empat miliar rupiah).



Model Pemberdayaan Lokal dalam Pariwisata Nusa Penida

Prof. Dr. Drs. I Made Sumada, M.M., M.Si

**Model Pemberdayaan Lokal
dalam Pariwisata Nusa Penida**

©Prof. Dr. Drs. I Made Sumada, M.M., M.Si, 2025

Editor: Made Prarabda Karma

Desain sampul dan tata letak: I Made Dedi Suardika

84 hal, 14 x 21 cm

ISBN: 978-623-8454-65-5

Cetakan pertama, Agustus 2025

Diterbitkan pertama kali oleh:

Penerbit Galuh Patria

Kaliajir Lor, Gg. Sadewo No. 18, Rt. 02/11 Kalitirto, Berbah, Sleman.

Web: www.galuhpatria.id

Email: penerbitgaluhpatria@gmail.com

Tlp/WA: 082265550883

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit. All right reserved.

Kata Pengantar

Buku ini menyajikan sebuah telaah kritis dan praktis mengenai *Model Pemberdayaan Lokal Dalam Pariwisata Nusa Penida*. Fokus utamanya adalah bagaimana masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam pembangunan berbasis potensi lokal, bukan sekadar objek dari kebijakan yang bersifat top-down.

Di tengah perubahan global dan tekanan terhadap keberlanjutan, pariwisata tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai alat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial. Nusa Penida, sebagai kawasan kepulauan dengan potensi alam dan

budaya yang besar, menunjukkan dinamika menarik dalam hal ini. Kehadiran wisatawan dalam jumlah besar menciptakan peluang ekonomi baru bagi warga, namun sekaligus menuntut tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui tiga pilar utama—organisasi, sumber daya, dan metode—teori Charles O. Jones membantu menjelaskan bagaimana kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan secara efektif. Buku ini mengulas bagaimana struktur kelembagaan di tingkat desa bekerja, sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta metode apa yang paling mendorong partisipasi aktif warga.

Manfaat buku ini tidak hanya terletak pada kajian teoritis, tetapi juga pada praktik lapangan yang dapat dijadikan contoh konkret oleh berbagai pihak. Bagi peneliti, buku ini menyuguhkan pendekatan aplikatif terhadap studi implementasi kebijakan dan pembangunan partisipatif. Bagi pemangku kebijakan, buku ini menyodorkan rekomendasi strategis dalam

mengembangkan desa wisata berbasis komunitas secara berkelanjutan. Adapun bagi masyarakat umum, khususnya pelaku wisata lokal, buku ini dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus refleksi bahwa kemandirian desa bukanlah wacana kosong, melainkan sesuatu yang bisa dicapai dengan kolaborasi dan keberdayaan bersama.

Dengan menyoroti praktik pemberdayaan masyarakat di Nusa Penida sebagai studi kasus, buku ini diharapkan bisa memberi sumbangsih pemikiran dan wawasan untuk pengembangan model pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan berbasis kekuatan lokal di berbagai daerah lain di Indonesia.

Prof. Dr. Drs. I Made Sumada, M.M., M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Daftar Isi.....	9
Pendahuluan.....	11
Dari Kebijakan ke Aksi	17
Konsep Implementasi Kebijakan	17
Konsep Pemberdayaan Masyarakat	18
Pengelolaan Pariwisata	23
Variabel yang Memengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Publik	26
Hambatan Implementasi Kebijakan	32

Pariwisata Partisipatif dan Kemandirian Lokal. 38

Kondisi Pariwisata di Kecamatan Nusa Penida	38
Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan	46
Bentuk Pemberdayaan	49
a. Aktif melibatkan partisipasi masyarakat	49
b. Melakukan Pertemuan	51
c. Manajemen Pengelolaan Dana	52
Dampak Pemberdayaan	53
Permasalahan dan Upaya Mengatasinya	54
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan	56
a. Faktor Pendukung	56
b. Faktor Penghambat	57

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Berdasarkan Teori Charles O. Jones: Studi Kasus

Kecamatan Nusa Penida61

a. Organisasi	61
b. Sumberdaya	62
c. Unit-Unit/Struktur Organisasi	64
Metode Pemberdayaan Masyarakat Nusa Penida	66
Interpretasi Keberhasilan	67
Aplikasi	71

Penutup..... 74

Daftar Pustaka..... 77

Tentang Penulis.....81

Pendahuluan

Mampukah masyarakat berdaya untuk membangun kemandirian desa? Kemampuan masyarakat untuk membantu diri sendiri (*self-help*) merupakan fondasi utama dalam membangun kemandirian desa. Ketika warga diberi ruang untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan, maka transformasi sosial tidak lagi hanya bergantung pada intervensi dari luar, melainkan tumbuh dari kesadaran dan kekuatan internal komunitas itu sendiri. Dalam kerangka inilah, kebijakan otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

menjadi titik balik penting. Tidak sekadar membawa dana pembangunan ke desa, kebijakan ini membuka jalan bagi lahirnya desa-desa yang berdaya—yang mampu mengenali potensi, mengelola sumber daya, dan menciptakan masa depan dengan kekuatannya sendiri.

Melalui pemberdayaan inilah diharapkan terjadi perubahan nyata yang mampu mengangkat kembali harkat dan martabat masyarakat desa. Pemberdayaan dimaknai sebagai pendekatan holistik yang menjangkau seluruh aspek kehidupan sosial, dengan tujuan membangun kemandirian di berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini mendorong tumbuhnya kemampuan untuk membantu diri sendiri (*self-help*) dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh—baik dari segi pola pikir, sikap, maupun perilaku yang lebih modern dan progresif. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi sektor strategis yang perlu terus diperkuat dan dikembangkan. Esensi dari pemberdayaan di pedesaan terletak pada pendayagunaan potensi lokal, peningkatan partisipasi aktif warga, serta

penguatan solidaritas dan kepedulian kolektif dalam mewujudkan kemandirian desa.

Implikasi dari berkembangnya konsep otonomi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah meningkatnya kewenangan pemerintah desa dalam mengelola aset dan sumber daya potensial. Pemerintah desa didorong untuk mampu mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang dapat memajukan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Dalam konteks ini, pemberdayaan menjadi kunci untuk mendorong inisiatif lokal dan peningkatan kesejahteraan.

Pengentasan kemiskinan juga menjadi isu global yang direkomendasikan oleh UNWTO bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Isu ini terkait erat dengan *Millennium Development Goals (MDGs)* yang dicanangkan oleh PBB sejak September 2000, dengan salah satu target utamanya adalah mengurangi setengah jumlah penduduk miskin di dunia (Frangialli, 2006). Dalam kerangka ini, UNWTO dan lembaga-lembaga terkait turut mengampanyekan pariwisata sebagai instrumen efektif dalam memerangi kemiskinan.

Sejumlah negara telah mengembangkan *pariwisata berbasis desa*, dengan memanfaatkan potensi lokal. Pariwisata diyakini mampu meningkatkan pendapatan dan menyerap tenaga kerja lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan nasional karena prospeknya yang besar (Pitana & Gayatri, 2005: 54). Daerah-daerah dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, seperti Kecamatan Nusa Penida, layak dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan.

Kabupaten Klungkung, dengan ibu kota Semarapura, memiliki dua pertiga wilayahnya berupa kepulauan, yakni Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Pembangunan di daerah ini berfokus pada tiga sektor utama: perikanan, industri, dan pariwisata. Masyarakat Nusa Penida sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, dan banyak di antaranya merantau ke Bali daratan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Nusa Penida berkembang pesat sebagai destinasi wisata unggulan. Kehadiran wisatawan membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam sektor pariwisata dengan membangun akomodasi, restoran, transportasi, serta pusat-pusat belanja dan daya tarik wisata lainnya. Peningkatan ini turut mendorong pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan landasan hukum bagi pengembangan sumber daya pariwisata oleh pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) sebagai pedoman kebijakan pembangunan pariwisata daerah yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Kebijakan pembangunan di tingkat daerah idealnya bukan hanya sekadar bentuk ketaatan administratif, melainkan juga respons terhadap kebutuhan dan kapasitas lokal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, ditetapkan 16 kawasan pariwisata, salah satunya di Kepulauan Nusa Penida, yang tersebar di tujuh desa: Suana, Batununggul, Ped, Toyapakeh, Lembongan, Jungutbatu, dan Sakti. Dari ketujuh desa tersebut, Desa Lembongan dan Jungutbatu relatif lebih maju dalam sektor pariwisata.

Untuk menunjang pembangunan pariwisata di Nusa Penida, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Bali Tahun 2015–2029. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan pariwisata yang berkontribusi positif bagi daerah. Namun hingga kini, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal, mengingat masih banyak kendala, terutama dalam aspek infrastruktur dan aksesibilitas.

BAB 2

Dari Kebijakan ke Aksi

Konsep Implementasi Kebijakan

Secara umum, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan tindakan administratif pada tingkat program tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) dalam Akib (2010). Proses ini dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah dirancang, dan sumber daya, termasuk pendanaan yang siap untuk digunakan guna mencapai target yang ditentukan. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan publik sering kali

tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, tidak jarang kebijakan yang telah dirumuskan justru menjadi kendala bagi para pengambil kebijakan itu sendiri (Tahir, 2014).

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan keputusan setelah kebijakan dirumuskan, baik berupa pasal-pasal dalam undang-undang legislatif, peraturan eksekutif, keputusan pengadilan, maupun standar prosedur lainnya. Implementasi menentukan bagaimana kebijakan tersebut memberikan konsekuensi nyata bagi masyarakat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pembangunan terus berkembang seiring perubahan zaman, sehingga interpretasinya pun menjadi kompleks bagi masyarakat awam. Meski begitu, esensi pembangunan tetaplah sama, yakni untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khairuddin (1992:28) menyatakan bahwa “Tujuan pembangunan di mana

pun pasti bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”

Sejalan dengan itu, Midgley dalam Anwas (2013:42) menekankan bahwa pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada aspek ekonomi telah gagal dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi perlu dilengkapi dengan orientasi sosial kemanusiaan yang dilakukan secara sinergis oleh pemerintah, masyarakat, dan individu. Dari sinilah muncul konsep pemberdayaan (*empowerment*), yang berasal dari kata *power*, yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah proses mendistribusikan kekuasaan atau kemampuan kepada pihak-pihak yang kurang berdaya, agar mereka memiliki kapasitas untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, serta dihargai sebagai makhluk sosial yang berhak hidup sejahtera.

Menurut Tjokrowinoto (2007:218), fokus dari pembangunan manusia adalah kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Pembangunan ini harus didasarkan pada keseimbangan ekologi, informasi

yang terbuka, dan prakarsa kreatif yang bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia secara optimal. Sumaryadi (2005:14) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat manusia, baik secara individu maupun kelembagaan. Proses pemberdayaan meliputi: (1) menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) memperkuat potensi tersebut melalui langkah-langkah yang positif, dan (3) membuka akses terhadap berbagai peluang.

Chambers dan Kartasmita dalam Huraerah (2011:95) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan baru yang berorientasi pada masyarakat (*people-centered*), partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Dalam perspektif manajemen, Wibowo (2005:160) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk menjadikan individu lebih mampu menyelesaikan masalahnya sendiri melalui pemberian kepercayaan

dan kewenangan, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Soetomo (2006:79) mengartikan *community development* sebagai suatu proses integratif antara masyarakat dan otoritas pemerintah untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya komunitas, serta mendorong kontribusi komunitas terhadap kemajuan nasional. Tiga prinsip utama dari *community development* adalah: (1) perhatian pada komunitas sebagai satu kesatuan, (2) berorientasi pada kebutuhan dan masalah komunitas, serta (3) mengutamakan prakarsa, partisipasi, dan swadaya masyarakat.

Suharto (2010:47) menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas dan kepentingan bersama. Sementara Sumaryadi (2013:100) menambahkan bahwa masyarakat mengandung unsur nilai-nilai manusia, rakyat, dan hubungan antar individu yang diatur dalam suatu sistem. Robert MacIver dalam Miriam Budiardjo (2013:46) menyebut masyarakat sebagai

sistem hubungan yang tertata (*a system of ordered relation*). Sumaryadi (2005:111) juga menyebut bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat agar dapat mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Slamet dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:100) memaknai pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang memperkuat kemampuan masyarakat melalui pembelajaran partisipatif, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengalami transformasi perilaku ke arah yang lebih berdaya dan mandiri. Demikian pula Suhendra (2006:75) dan Sunyoto Usman dalam Huraerah (2008:87) menyebut pemberdayaan sebagai proses penguatan *community self-reliance*. Mohammad Jafar (2008:136) menegaskan bahwa pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*.

Berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kapasitas individu dan komunitas untuk berpartisipasi aktif, mandiri, dan sejahtera dalam proses pembangunan.

Pengelolaan Pariwisata

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan diartikan sebagai suatu proses atau tindakan dalam mengatur dan mengendalikan suatu kegiatan, yang mencakup penggerakan sumber daya, perumusan kebijakan, hingga pengawasan pelaksanaannya, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Sementara itu, secara etimologis, istilah “manajemen” berasal dari bahasa Inggris *management*, dari kata *to manage* yang berarti mengatur atau mengelola, yang berasal dari bahasa Italia *maneggio* dan Latin *manus* (tangan) (Samsudin, 2006:15). Darsoprajitno menyebutkan bahwa walaupun secara terminologi berbeda, pengelolaan dan manajemen memiliki

kedekatan makna, yakni pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Menurut Soewarno, pengelolaan berarti mengendalikan atau menyelenggarakan sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran organisasi. Keating (1995:75) menambahkan bahwa pengelolaan adalah bentuk kepemimpinan khusus yang bekerja melalui orang lain, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk menikmati waktu luang, melakukan penelitian, mengembangkan diri, serta mempelajari berbagai daya tarik wisata yang khas di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Mathieson dan Wall (1982, dalam Pitana dan Gayatri, 2005), pariwisata dapat diartikan sebagai perpindahan sementara individu ke luar dari tempat tinggal dan tempat kerjanya sehari-hari, yang

mencakup berbagai aktivitas selama berada di lokasi tujuan, serta dukungan fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama perjalanan tersebut. Pitana dan Gayatri menambahkan, pariwisata melibatkan tiga komponen penting, yaitu perjalanan menuju destinasi, tinggal di lokasi wisata, serta dampak yang ditimbulkan dari kedua aktivitas tersebut.

Sementara itu, Gunn (1988) menyebutkan bahwa berbagai lokasi seperti taman, pantai, taman hiburan, resort, area perkemahan, pusat hiburan, pusat konvensi, kasino, tempat bermain ski, serta rumah teman dan keluarga, dapat menjadi tujuan utama dalam perjalanan wisata.

Dengan demikian, pengelolaan pariwisata merupakan proses mengatur dan mengendalikan kegiatan wisata secara efektif dan efisien, melalui pemanfaatan sumber daya, perumusan kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis, pengelolaan berkaitan erat dengan manajemen, yakni tindakan

kepemimpinan yang bekerja melalui individu atau kelompok. Dalam konteks kepariwisataan, aktivitas wisata mencakup perjalanan, tinggal di destinasi, dan dampaknya. Destinasi wisata dapat berupa taman, pantai, resort, hingga rumah kerabat. Pengelolaan yang baik mendukung keberlangsungan pariwisata dan pemenuhan kebutuhan wisatawan selama perjalanan.

Variabel yang Memengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975:25), terdapat enam variabel utama yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Pertama, standar dan sasaran kebijakan harus dirumuskan dengan jelas dan terukur agar dapat direalisasikan secara efektif di lapangan. Kedua, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia yang kompeten maupun sumber daya non-manusia seperti dana, fasilitas, dan teknologi. Ketiga, implementasi kebijakan memerlukan

dukungan dan koordinasi yang baik antarinstansi, sebab kerja sama lintas lembaga sangat menentukan kelancaran pelaksanaan. Keempat, karakteristik dari agen pelaksana juga memegang peran penting, termasuk struktur organisasi, kapasitas, serta gaya kepemimpinan yang dijalankan. Kelima, kondisi sosial, politik, dan ekonomi di lingkungan pelaksana turut memengaruhi dinamika implementasi, termasuk stabilitas politik dan dukungan masyarakat. Terakhir, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan—disebut implementor—menjadi faktor yang tidak kalah penting. Disposisi ini mencakup tanggapan mereka terhadap kebijakan, kemauan untuk melaksanakannya, serta preferensi nilai yang dimiliki. Ketiga aspek ini menentukan seberapa kuat komitmen mereka dalam menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan. Keenam variabel tersebut saling terkait dan menentukan tingkat keberhasilan implementasi secara menyeluruh.

Menurut Cheema dan Rondinelli (1983:25), terdapat empat variabel utama yang memengaruhi kinerja dan dampak suatu program pembangunan. Pertama

adalah **kondisi lingkungan**, yang mencakup aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang membentuk konteks tempat program dijalankan. Lingkungan yang kondusif akan memperbesar peluang keberhasilan program. Kedua, **hubungan antarorganisasi** menjadi penting, karena keberhasilan implementasi sering kali bergantung pada koordinasi dan kerja sama yang efektif antar lembaga pelaksana. Ketiga, **ketersediaandankualitassumberdayaorganisasi**, baik dari segi personel, dana, informasi, maupun sarana pendukung, turut menentukan sejauh mana program dapat dijalankan sesuai tujuan. Terakhir, **karakteristik dan kemampuan agen pelaksana**, termasuk kompetensi teknis, kepemimpinan, dan motivasi kerja, akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Keempat variabel ini saling berkaitan dan menjadi penentu utama tercapainya tujuan serta dampak jangka panjang dari suatu program.

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2012), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama adalah

komunikasi, yaitu sejauh mana keputusan kebijakan dan aturan pelaksanaannya dapat disampaikan secara jelas dan tepat kepada seluruh pelaksana dan pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Komunikasi yang baik akan meminimalkan kesalahpahaman dan memperkuat koordinasi. Kedua adalah **sumber daya**, yang mencakup ketersediaan dan kecukupan unsur-unsur penting seperti sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik pun sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Faktor ketiga adalah **disposisi**, yakni sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kemauan dan motivasi para aktor birokrasi, yang dipengaruhi oleh sistem pengangkatan serta pemberian insentif. Terakhir adalah **struktur birokrasi**, yang berfungsi sebagai kerangka kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks atau tidak fleksibel dapat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan

program. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Sedarmayanti(2012) menjelaskan: Akuntabilitas adalah para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Efektivitas dan efisiensi adalah Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Menurut Jones (1996:164), terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam proses implementasi

kebijakan. Pertama adalah **organisasi**, yaitu upaya untuk membentuk atau menata kembali sumber daya, unit kerja, serta metode pelaksanaan guna memastikan program dapat berjalan secara efektif. Organisasi ini mencakup pembagian tugas, penyediaan perangkat kerja, dan penyesuaian struktur agar mendukung kelancaran implementasi.

Kedua adalah **interpretasi**, yang merujuk pada proses penafsiran kebijakan ke dalam bentuk rencana dan petunjuk pelaksanaan yang jelas, tepat, dan mudah dipahami. Interpretasi ini penting agar para pelaksana mengetahui secara pasti apa yang harus mereka lakukan, sehingga kebijakan tidak hanya berhenti pada dokumen formal, tetapi dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Ketiga adalah **aplikasi atau penerapan**, yaitu pelaksanaan kegiatan rutin yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa sesuai dengan tujuan program. Penerapan ini melibatkan prosedur operasional yang telah ditentukan, seperti pelayanan, pembayaran, dan aktivitas lain yang menjadi bagian

dari pelaksanaan program secara langsung. Ketiga aktivitas ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang bersifat dinamis, sistematis, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan program serta mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Proses ini tidak hanya sebatas pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup upaya strategis untuk memastikan bahwa kebijakan diterjemahkan secara efektif ke dalam tindakan nyata. Dengan demikian, implementasi yang baik akan menghasilkan capaian yang sejalan dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang dirumuskan.

Hambatan Implementasi Kebijakan

Menurut Gowdan Morss (dalam Pasolong, 2007:59), proses implementasi kebijakan kerap terhalang oleh beragam faktor. Hambatan politik, ekonomi, dan

kondisi lingkungan dapat menggoyang stabilitas program sejak awal. Kelemahan institusi—mulai dari struktur organisasi yang tidak memadai hingga alur koordinasi yang tumpang tindih—memperburuk efektivitas pelaksanaan. Tidak kalah penting, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif serta kekurangan bantuan teknis mengurangi daya dukung pelaksana di lapangan. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi masyarakat membuat kebijakan terasa jauh dari kebutuhan nyata. Selanjutnya, pengaturan waktu yang kurang tepat (timing) dan sistem informasi yang tidak memadai menyebabkan data dan koordinasi terlambat atau tidak akurat. Perbedaan agenda antara pembuat kebijakan dan aktor pelaksana sering menimbulkan konflik prioritas, sementara dukungan yang tidak berkelanjutan membuat capaian program sulit dipertahankan. Semua hambatan ini saling terkait dan membutuhkan strategi terpadu untuk memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan.

Hambatan dalam implementasi kebijakan pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori

utama: hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam sistem pelaksana itu sendiri, misalnya keterbatasan sumber daya manusia, kualitas input yang rendah, serta kelemahan dalam sistem dan prosedur operasional yang digunakan. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup berbagai faktor di luar kendali pelaksana kebijakan, namun memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya implementasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah peraturan atau kebijakan pemerintah yang belum sinkron, respons dan dinamika kelompok sasaran, perubahan dalam kecenderungan ekonomi dan politik, serta kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat memengaruhi penerimaan dan partisipasi terhadap kebijakan yang dijalankan. Kedua jenis hambatan ini perlu diidentifikasi dan dikelola dengan tepat agar proses implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Weimer dan Vining (dalam Pasolong, 2007:59), keberhasilan atau kegagalan implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama adalah **logika kebijakan**, yakni sejauh mana teori yang mendasari kebijakan tersebut memiliki hubungan yang logis dan rasional antara aktivitas yang dirancang dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Semakin kuat dan tepat logika kebijakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilannya. Kedua, keberhasilan juga ditentukan oleh **hakikat kerja sama** yang dibangun dalam pelaksanaannya. Hal ini menyangkut apakah seluruh pihak yang terlibat membentuk suatu kolaborasi yang produktif, saling melengkapi, dan memiliki kesatuan arah. Ketiga, **ketersediaan sumber daya manusia** yang kompeten dan berkomitmen juga menjadi faktor penentu. SDM yang memahami tugasnya, memiliki keterampilan teknis, serta tekad kuat untuk menjalankan kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Ketiga faktor ini harus berjalan seimbang agar pelaksanaan kebijakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Sementara Edward (dalam Winarno, 2002:125) menjelaskan, implementasi kebijakan adalah

tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Wiliam.N.Dun (2000:24-25) menganjurka, di setiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisa. Analisa yang dimaksud tidak identik dengan evaluasi karena dari tahapan penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan (*policyevaluation*) sudah harus dilakukan analisis.

Berdasarkan beberapa kajian teori yang ada, penggunaan teori menurut Jones (1996:164), mengemukakan bahwa ada tiga aktivitas utama yang paling penting dalam implemetasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi (penerapan) diduga layak untuk diterapkan dalam mengkaji Model Pemberdayaan Lokal dalam Pariwisata Nusa Penida.

BAB 3

Pariwisata Partisipatif dan Kemandirian Lokal

Kondisi Pariwisata di Kecamatan Nusa Penida

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti mengungkap kondisi nyata kepariwisataan di Kecamatan Nusa Penida, mulai dari aspek historis hingga potensi pengembangannya. Informasi tersebut tercermin dari wawancara dengan Bapak Camat Nusa Penida sebagai narasumber kunci.

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata Nusa Penida, dalam wawancara ini Camat Nusa Penida menyatakan, “Pengembangan pariwisata di Nusa

Penida dimulai pada tahun 2014, untuk pertama kalinya digelar sebuah promosi wisata bertajuk "Festival Nusa Penida". Festival ini mampu menyedot perhatian publik melalui suguhan acara yang mengombinasikan seni, tradisi, dan keindahan alam dan semenjak itu Nusa Penida mulai dikenal di seluruh dunia."

Hal tersebut berarti bahwa perkembangan sektor pariwisata di Kecamatan Nusa Penida tidak serta merta terjadi seperti saat ini tanpa adanya usaha dari pemerintah. Pemerintah menggagas *event* yang bertujuan untuk memperkenalkan Nusa Penida pada seluruh dunia. Usaha tersebut menjadi cikal bakal perkembangan pariwisata di Nusa Penida.

Selain itu, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Festival Nusa Penida* tahun 2014 menjadi momentum penting dalam memulai pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal. Strategi promosi melalui festival budaya terbukti efektif dalam menarik perhatian publik. Kombinasi antara seni, tradisi, dan keindahan alam merupakan daya tarik khas yang tidak hanya merepresentasikan kekayaan lokal, tetapi

juga membedakan Nusa Penida dari destinasi wisata lainnya.

Fakta bahwa festival ini langsung mendapat respons positif menandakan bahwa promosi berbasis event memiliki kekuatan besar dalam membangun citra destinasi. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya identitas budaya dan alam sebagai modal utama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Sejak 2014, efek dari festival tersebut tampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan dan naiknya popularitas Nusa Penida di tingkat internasional. Ini menandakan bahwa inisiatif lokal yang dikelola dengan baik bisa menjadi pemicu pertumbuhan sektor pariwisata, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengakuan global terhadap suatu wilayah. Namun, keberlanjutan dan pengelolaan dampak jangka panjang tetap menjadi tantangan utama ke depan.

Selain itu, dalam wawancara dengan bapak Camat juga dikemukakan tentang kondisi masyarakat yang ditinjau dari sisi ekonomi, seperti berikut, “Mata

pencaharian penduduk Nusa Penida sebagian besar sebagai petani dan ada sebagian menggantungkan hidupnya untuk bekerja pada sektor formal maupun informal di kota-kota besar daerah Bali daratan, namun semenjak berkembangnya pariwisata, sebagian besar penduduk Nusa Penida beralih ke sektor pariwisata, ada di bidang jasa akomodasi, transportasi, dan jasa pemandu wisata, sehingga mampu meningkatkan roda perekonomian warga Nusa Penida, namun dimasa pandemi banyak warga yang kehilangan penghasilan karena menurunnya kunjungan wisatawan ke Nusa Penida, dan saat ini sebagian dari mereka menggeluti kembali pekerjaan yang sebelumnya ditinggalkan yaitu sebagai petani rumput laut, untuk menyambung hidup mereka bersama keluarga.”

Hal tersebut menandakan bahwa sektor pariwisata berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi pada masyarakat yang berada di Nusa Penida. Sebagian penduduknya beralih profesi menjadi pelaku pariwisata. Peralihan tersebut tidak terlepas dari adanya kesadaran masyarakat tentang besarnya

potensi pariwisata yang dimiliki Kecamatan Nusa Penida.

“Potensi yang dimiliki Nusa Penida cukup banyak diantaranya pemandangan alam dan bawah laut serta sejumlah pura yang berpotensi menjadi tujuan wisata religi. Hal ini sangat potensial dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru khususnya di Nusa Penida, dan Kabupaten Klungkung pada umumnya sehingga mampu meningkatkan PAD Kabupaten Klungkung.”

Potensi yang besar tersebut diimbangi dengan adanya visi misi pariwisata yang luar biasa dari pemerintah daerah. Visi dan misi tersebut seperti tercermin dalam hasil wawancara kepada Camat Nusa Penida sebagai berikut ini.

“Visi kami untuk Nusa Penida adalah menjadikannya *The Blue Paradise Island* atau *Pulau Surga Biru*,” ujar salah satu tokoh pariwisata setempat. “Visi ini bukan sekadar slogan, tapi cita-cita bersama untuk menjadikan Nusa Penida sebagai destinasi unggulan yang indah, bersih, dan berkelanjutan.”

“Adapun misi yang mendukung visi tersebut yaitu Pertama, kami berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama laut Nusa Penida yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Kedua, melalui pengelolaan pariwisata yang bijak, kami ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah Klungkung. Dan yang tak kalah penting, kami menerapkan konsep *One Gate One Destination*, artinya setiap pintu masuk di Nusa Penida diarahkan menuju satu tujuan wisata yang jelas dan terorganisir, agar pengelolaan destinasi lebih efisien dan merata.”

Terdapat banyak obyek yang ditawarkan di Kecamatan Nusa Penida kepada para turis sebagai daya tariknya. Obyek tersebut membuat para turis sulit untuk melupakan dan kemudian datang kembali berkunjung ke Nusa Penida. Hal tersebut tercermin dari hasil wawancara kepada Camat Nusa Penida berikut :

“Banyak, ada Klingking Beach yang sudah mendunia, Broken Beach, Angel Billabong, Diamond Beach, Rumah Pohon dan masih banyak lainnya.”

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada perkumpulan pelaku pariwisata di Kecamatan Nusa Penida, didapatkan bahwa seiring dengan dikenalnya Nusa Penida di Indonesia maupun mancanegara, pelaku pariwisata di Nusa Penida memiliki komitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kepariwisataan bagi para pengunjung. Hal tersebut diwujudkan dengan dibentuknya perkumpulan pelaku pariwisata Nusa Penida.

“Diawali dengan kehadiran banyaknya wisatawan manca negara ke Nusa Penida secara otomatis penggiat pariwisata yang sebagian besar berkiprah di daratan Bali bersinergi dengan masyarakat Nusa Penida dan menyatukan diri dalam wadah Penggiat Pariwisata Nusa Penida selanjutnya berkolaborasi dengan pengalaman yang sudah dimiliki untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan wisatawan.”

Terbentuknya perkumpulan pelaku pariwisata Nusa Penida tersebut berdampak positif terhadap kemajuan sektor pariwisata di Kecamatan Nusa Penida, khususnya dalam penyediaan fasilitas penunjangnya. Berbagai fasilitas yang tersedia mulai dari penginapan samapai dengan sarana transportasi. Berikut hasil wawancaranya.

“Saat ini fasilitas pariwisata di Nusa Penida sudah cukup lengkap dan terus berkembang. Untuk akomodasi, kami sudah memiliki berbagai pilihan penginapan, mulai dari hotel bintang tiga, vila, bungalow, hostel, hingga homestay yang nyaman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tempat makan juga bervariasi, ada restoran, beach club, rumah makan, dan warung tradisional yang menyajikan kuliner lokal khas Nusa Penida.”

“Selain itu kami juga menyediakan fasilitas untuk kegiatan laut seperti diving, snorkeling, mancing, jetski, dan wahana watersport lainnya. Dari sisi transportasi, pengunjung bisa menyewa sepeda, motor, mobil, atau naik speedboat untuk menjangkau

destinasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah. Objek wisatanya pun beragam dan eksotis, dari Kelingking Beach, Angel's Billabong, Broken Beach, Crystal Bay, Diamond Beach, Atuh Beach, Rumah Pohon Molenteng, Temeling Waterfall, sampai Bukit Teletubbies. Bahkan, bagi wisatawan yang mencari pengalaman spiritual, kami punya banyak pura suci seperti Pura Dalem Ped, Giri Putri Cave Temple, dan Pura Puncak Mundi. Semua itu menjadi kekuatan utama daya tarik Nusa Penida.”

Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat peneliti kemukakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengelola pariwisata di Kecamatan Nusa Penida melalui peningkatan kemampuan intelektual. Peningkatan kemampuan intelektual ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan keterampilan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan berupa evaluasi dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan dan evaluasi

hasil pemberdayaan masyarakat. Dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek yaitu pertama aspek ekonomi dengan mendapatkan penghasilan tambahan, kedua aspek sosial dengan terbentuknya kelompok-kelompok kerja dan keterlibatan masyarakat dalam kepengurusan merupakan wujud dari kemampuan masyarakat dalam kehidupan sosial, dan ketiga aspek kultural dengan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya.

Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Camat Nusa Penida sebagai berikut.

“Pengembangan infrastruktur seperti jalan, listrik, namun belum optimal karena keterbatasan anggaran, dan yang terbaru sedang dibangun pelabuhan segitiga mas atas bantuan dari pemerintah pusat guna meningkatkan kunjungan wisatawan pasca pandemi.

Selain itu Camat Nusa Penida juga menegaskan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Nusa Penida.

“Banyak pihak yang terlibat,ada pemerintah daerah baik Kabupaten Klungkung maupun Provinsi Bali, pemerintah pusat,serta peran dan partisipasi dari masyarakat Nusa Penida. Sedang diupayakan untuk menggaet investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk mau menanamkan modalnya sehingga bisa membantu pengembangan pariwisata Nusa Penida.”

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat juga mengungkapkan pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida harus melibatkan peran serta masyarakat. Seperti hasil wawancara berikut ini :

“Masyarakat melalui desa adat dilibatkan dalam membantu menjaga ketertiban dalam memberikan rasan yaman bagi para pengunjung khususnya wisata religi.”

Bentuk Pemberdayaan

Adapun beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pengelola pariwisata di Kecamatan Nusa Penida, meliputi:

a. Aktif melibatkan partisipasi masyarakat

Keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak terlepas dari peran serta masyarakat berkontribusi dalam pengembangan lebih jauh sektor pariwisata di Kecamatan Nusa Penida. Masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan pariwisata harus memiliki pola pikir dan komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas dan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang. Hal itu diungkapkan dalam wawancara dengan tokoh masyarakat I Putu Arnawa (41 tahun) :

“Masyarakat Nusa Penida memiliki peran aktif dalam mengembangkan potensi wisata di Nusa Penida sehingga tidak selalu bergantung kepada pihak luar atau investor. Seperti Swadaya dalam membangun fasilitas parkir dan toilet umum untuk pengunjung. Ikut berpartisipasi menjaga keamanan wilayah

yang dikendalikan oleh desa adat selain keamanan dari pihak kepolisian. Mengingat kunjungan wisata telah mendorong perekonomian penduduk Nusa Penida.”

Senada dengan hal tersebut, dalam wawancara lainnya yang dilakukan kepada Camat Nusa Penida, disebutkan tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida :

“Masyarakat Nusa Penida berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan keamanan daerahnya, serta keramahan masyarakat Nusa Penida mampu menghipnotis wisatawan yang berkunjung, dan berpartisipasi langsung dalam mempromosikan daerahnya berupa penyelenggaraan Nusa Penida Festival yang dilaksanakan setiap tahun di masa sebelum pandemi.”

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung suksesnya program pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida.

b. Melakukan Pertemuan

Dilaksanakan sebagai program insidental bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan media bertemu antara pengelola dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk belajar bersama, bertukar informasi, dan berdiskusi evaluasi tentang kegiatan-kegiatan mereka selama ini. Diskusi kelompok menuntun masyarakat untuk berpartisipasi aktif sehingga memunculkan ide-ide baru untuk kegiatan-kegiatan mereka selanjutnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Perkumpulan Pelaku Pariwisata di Kecamatan Nusa Penida :

“Pertemuan rutin terjadwal tidak ada, tetapi setiap saat dirasakan perlu, akan dilakukan pertemuan dan berkumpul membahas *issue* dan perkembangan pariwisata Nusa Penida.”

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat juga menyampaikan hal yang sama terkait pentingnya dilakukan pertemuan secara rutin.

“Para pelaku pariwisata kadangkala bertemu membahas hal-hal yang terkait dengan isu-isu terbaru yang berpotensi memengaruhi tingkat

kunjungan wisata ke Nusa Penida baik wisata religi maupun wisata perairan.”

Pertemuan harus dilakukan secara rutin dan sebaiknya melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk membahas permasalahan terkini dalam pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida. Selain itu, pertemuan rutin juga digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pariwisata.

c. Manajemen Pengelolaan Dana

Dana merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin keberlangsungan dan berkembangnya pariwisata di Kecamatan Nusa Penida. Sebagai tindak lanjutnya, pengelolaan dana untuk menunjang kegiatan dilakukan secara transparan dengan sumber dana yang jelas. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Perkumpulan Pelaku Pariwisata di Kecamatan Nusa Penida :

“Dana untuk pertemuan didapatkan secara swadaya, kecuali saat mengadakan *event*, dana juga dibantu dari

pengusaha dan sponsor. Tidak ada dana yang dikelola oleh perkumpulan, melainkan mengelola potensi sumber daya alam yang ada untuk menghasilkan uang.”

Dampak Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata merupakan konsep yang mudah dilontarkan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan, karena konsep ini merupakan suatu konsep yang holistik dan terus menerus untuk digali dan diberdayakan. Diberdayakan dalam arti filosofi hidup di masyarakat, pendidikan, keterampilan, sikap/tata krama, aturan bermasyarakat, adat bahkan sampai pada penampilan masyarakat itu sendiri. Selain itu, dengan adanya program-program yang diadakan oleh pengelola Pariwisata di Kecamatan Nusa Penida telah banyak terjadi perubahan dalam masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kultural. Seperti halnya yang dikatakan oleh Camat Nusa Penida sebagai berikut :

“Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Nusa Penida mampu meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat Nusa Penida, serta bisa mengurangi angka kemiskinan di Nusa Penida.”

Sedikit berbeda dengan Camat Nusa Penida, masyarakat mengungkapkan dampak positif dan negatif dari perkembangan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida.

“Masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan dari sektor pariwisata. Kehidupan sosial masyarakat akan berpotensi terganggu jika adanya banyak pendatang yang ikut mencari penghidupan pada sektor pariwisata di Nusa Penida.”

Permasalahan dan Upaya Mengatasinya

Berkembangnya pariwisata di Kecamatan Nusa Penida tidak hanya membuat banyak sektor mengalami perbaikan, namun juga terdapat berbagai macam persoalan yang muncul. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh masyarakat.

“Masalahnya adalah jika tanah-tanah warga dijual kepada pihak luar atau investor yang akan berpotensi mendesak keberadaanwarga lokal.”

Tidak hanya mengungkapkan permasalahan, masyarakat juga menjabarkan cara mengatasi masalah tersebut. Seperti hasil wawancara berikut ini.

“Pihak desa adat dalam berbagai kesempatan senantiasa menghimbau untuk tidak gampang menjual tanah kepada pihakluar agar penduduk asli tidak termarginalkan dalam perkembangan pariwisata di Nusa Penida.”

Mengingat adanya permasalahan yang sering muncul tersebut, diperlukan upaya-upaya nyata untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dan mendukung perkembangan pariwisata.Hal itu tercermin dari hasil wawancara yang dilakukan kepada PerkumpulanPelaku Pariwisata di Kecamatan Nusa Penida.

“Langkah yang sudah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk membangun akses

jalan menuju tempat kunjungan wisata, membangun komunikasi dengan pemerintah terkait dan masyarakat, serta menggalakan promosi lewat onlinedan dunia digital. Beberapa hal yang belum dilakukan diantaranya membangun kesepakatan harga dengan pemilik akomodasi pariwisata.”

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Nusa Penida ada dua faktor yang memengaruhinya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, penjelasannya sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh pengelola Wisata di Kecamatan Nusa Penida tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat, masyarakat Kecamatan Nusa Penida antusias dengan adanya pengelolaan Wisata di Kecamatan Nusa Penida dan mengikuti program

pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pengelola. Masyarakat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pelatihan dengan ikut serta di kepengurusan pengelola pariwisata, terlibat kegiatan wisata, dan wirausaha. Hal itu tercermin dari hasil wawancara dengan masyarakat berikut ini :

“Masyarakat Nusa Penida memiliki peran aktif dalam mengembangkan potensi wisata di Nusa Penida sehingga tidak selalu bergantung kepada pihak luar atau investor. Seperti Swadaya dalam membangun fasilitas parkir dan toilet umum untuk pengunjung. Iktu berpartisipasi menjaga keamanan wilayah yang dikendalikan oleh desa adat selain keamanan dari pihak kepolisian. Mengingat kunjungan wisata telah mendongkrak perekonomian penduduk Nusa Penida.”

b. Faktor Penghambat

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak selalu berjalan baik dan mulus. Pengelola Pariwisata Kecamatan Nusa Penida masih menemukan hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat. Hambatan utamanya dalam bidang infrastruktur. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Perkumpulan Pelaku Pariwisata Nusa Penida sebagai berikut,

“Faktor yang menghambat adalah dari infrastruktur seperti jalan masih kecil dan masih ada jalan ke tujuan wisata yang belum diaspal.”

Berikut adalah **tabel perbandingan** antara **faktor pendukung** dan **faktor penghambat** dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida:

Tabel 1. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pembedayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata di Kecamatan Nusa Pendika

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Partisipasi masyarakat	Tingginya partisipasi masyarakat dalam pelatihan, kepengurusan kegiatan wisata, dan wirausaha	-
Kemandirian lokal	Masyarakat aktif membangun fasilitas pariwisata secara swadaya (seperti toilet dan lahan parkir)	-
Keamanan dan ketertiban	Masyarakat menjaga keamanan bersama desa adat dan aparat kepolisian.	-
Dampak ekonomi	Kunjungan wisatawan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal	

Infrastruktur	-	Jalan menuju destinasi wisata masih kecil dan sebagian belum diaspal
---------------	---	--

BAB 4

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan

Berbasis Teori Charles O. Jones: Studi Kasus Kecamatan Nusa Penida

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Hasil penelitian ini didasari pada telaah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1994) dengan tiga aktifitas utama sebagai berikut:

a. Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones harus ada organisasi atau lembaga

yang melaksanakan. Jones(1994:166),mengatakan organisasi adalah “Kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumberdaya,unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan”. Bagi Jones (1994:296) organisasi birokrasi berkaitan dengan(a) pembentukan atau penataan kembali sumber daya, (b) unit-unit, serta (c) metode untuk menjadikan program berjalan.Dengan demikian ketiga aspek ini akan dibahas sebagai berikut:

b. Sumberdaya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumberdaya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan ukuran cukup dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka,otoritas,dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan.Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya sumberdaya

manusia,terbatasnya dana atau fasilitas dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata adalah merupakan sumbangan besar terhadap kurang optimalnya implementasi kebijakan.

Hasil penelitian yang diperoleh sehubungan dengan sumberdaya untuk pendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Berkaitan dengan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat, secara umum sudah sangat difasilitasi oleh pemerintah, sehingga hampir semua kegiatan wisata di Kecamatan Nusa Penida dapat berjalan. Selanjutnya sebagaimana pernyataan yang diperoleh dari seluruh informan dimana sebagian besar dana yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan wisata berasal dari dana pemerintah dan didukung oleh peran serta pelaku wisata dan masyarakat.

c. Unit-Unit/Struktur Organisasi

Organisasi birokrasi adalah unit-unit organisasi dimana unit-unit organisasi merupakan bagian dari model besar yakni struktur. Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, Handoko (1998:169) mengatakan, “ Dalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi”.

Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penataan struktur/unit perlu diatur melalui aturan jelas yang membatasi agar wewenang fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, tidak dilewati oleh birokrasi.

Adanya keteraturan yang jelas akan dapat menghilangkan tugas-tugas pegawai yang *overlapping* (tumpang tindih), demikian juga peraturan yang jelas akan dapat menciptakan prosedur kerja yang baku. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa struktur organisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nusa Penida sudah ada baik itu di pemerintah (Kecamatan Nusa Penida) maupun pada pelaku wisata Nusa Penida. Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida sehubungan dengan struktur birokrasi yang ada terkait tugas dan fungsi masing-masing anggota di satu sisi dapat dikatakan sudah sangat baik. Kenyataan ini dapat dibuktikan seperti ditemukannya dokumen laporan pertanggung jawaban kegiatan dan penggunaan dana yang cukup baik tertata. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur organisasi yang ada sudah berjalan efektif.

Metode Pemberdayaan Masyarakat Nusa Penida

Menurut Agus M. Hardjana.(2003), metode merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah,metode tidak kalah penting perannya didalam pencapaian tujuan.

Dengan adanya metode dalam sebuah organisasi,maka organisasi tersebut akan lebih mudah dan teratur dalam mencapai tujuan,visi dan misi yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida yang merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata, maka oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klungkung memilih cara untuk mewujudkannya

melalui pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hubungan ini partisipasi masyarakat berfungsi sebagai keluaran proses pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat berupaya mendorong masyarakat untuk bergotong-royong menciptakan kebersamaan masyarakat lingkungan dalam momen membangun Kecamatan Nusa Penida melalui pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata secara optimal.

Interpretasi Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Jones (1994:320) dengan mengutip pernyataan George C. Edwards, mengatakan : "Mereka yang menerapkan keputusan/ kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut. Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat apakah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannyamasing-masing, terkait hal itu proses penyampaian informasi, sosialisasi, kejelasan tugas, merupakan hal yang penting dan hal itu dilakukan melalui komunikasi yang baik disamping itu terkait juga dengan konsistensi pelaksana.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh data dimana dalam pelaksanaan kebijakan Kecamatan Nusa Penida, proses penyampaian informasi melalui bintek untuk kejelasan tugas dan sosialisasi, sudah berjalan baik. Keterlibatan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan merupakan awal yang baik dalam upaya bagaimana mau memberikan pemahaman dan rasa memiliki kepada semua elemen masyarakat akan pembangunan dan hal itu dapat diwujudkan dengan adanya penyampaian informasi yang baik dari pelaksana. Meskipun demikian, sosialisasi tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Jones (1994:320) dengan mengutip pernyataan George C. Edwards, mengatakan : "Mereka yang menerapkan keputusan/ kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang

apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut. Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat apakah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing, terkait hal itu proses penyampaian informasi, sosialisasi, kejelasan tugas, merupakan hal yang penting dan hal itu dilakukan melalui komunikasi yang baik disamping itu terkait juga dengan konsistensi pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh data dimana dalam pelaksanaan kebijakan Kecamatan Nusa Penida, proses penyampaian informasi melalui bintek untuk kejelasan tugas dan sosialisasi, sudah berjalan baik. Keterlibatan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan merupakan awal yang baik dalam upaya bagaimana mau memberikan pemahaman dan rasa memiliki kepada semua elemen masyarakat akan pembangunan dan hal itu dapat diwujudkan

dengan adanya penyampaian informasi yang baik dari pelaksana. Meskipun demikian, sosialisasi tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Aplikasi

Aplikasi atau penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Jones (1994:320) mengatakan *aplication* adalah “ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program”. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (target group).

Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena

itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor, adapun aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Tanggung jawab penuh dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida adap ada Pemerintah Kecamatan Nusa Penida.

Sesuai mekanisme aktifitas penyediaan pelayanan secara rutin dan pembayaran diperoleh informasi dari informan bahwa sekalipun para pelaksana telah mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan serta mekanisme pencairannya. Aparat pelaksana terkadang mengalami kesulitan dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang direncanakan karena terbatasnya waktu yang dimiliki, tapi secara umum semua kegiatan sudah berjalan dengan baik. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung tersebut yaitu:

1. Tingginya partisipasi masyarakat Nusa Penida.
2. Semangat dari pengurus pelaku pariwisata Nusa Penida dan masyarakat yang terlibat di dalamnya.
3. Kemampuan pengelola dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida.
4. Sikap gotong royong masyarakat Nusa Penida yang masih terasa kuat.

Selain faktor pendukung, juga ada faktor yang menghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Nusa Penida, diantaranya adalah keterbatasan infrastruktur penunjang. Infrastruktur utama yang dibutuhkan adalah adanya jalan yang memadai.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, yang menekankan pada tiga aspek utama—organisasi, sumber daya, dan metode—dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida telah menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih menghadapi beberapa kendala.

Dari sisi **organisasi**, telah terbentuk struktur birokrasi dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kebijakan, dengan pembagian tugas yang relatif jelas

dan mekanisme pelaporan yang berjalan. Dalam hal **sumber daya**, meskipun masih terbatas, pemerintah dan pelaku wisata telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Namun demikian, kekurangan pada infrastruktur dasar seperti akses jalan tetap menjadi hambatan utama.

Sedangkan dalam aspek **metode**, pendekatan partisipatif yang diterapkan telah mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan wisata, mengembangkan kemandirian, dan memperkuat kapasitas mereka melalui proses belajar berkelanjutan. Program ini juga menunjukkan adanya keselarasan pemahaman antara pelaksana dan penerima kebijakan, berkat komunikasi, sosialisasi, dan pelatihan yang intensif.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Nusa Penida berdasarkan kerangka Charles O. Jones dapat dikategorikan cukup efektif, terutama dalam membangun fondasi kelembagaan dan partisipasi publik. Namun,

diperlukan peningkatan infrastruktur dan penguatan koordinasi lintas aktor untuk memastikan kebijakan ini berdampak optimal dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

-,2012,*Good Governance dan Good Corporate Governance*,Bandung:Mandar Maju.
- 2008. *Kebijakan Publik. Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
-2010,*Teori Administrasi Publik*,Bandung:Alfabet.
-2013. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama.
-2007.*Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Model Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
-2012.*Kebijakan Publik. (Teori, Proses, dan Studi Kasus) CAPS*, Yogyakarta.
- Aan Komariah, Djarm'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabet.

- Akib Haedar.2010.Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana.Jurnal Administrasi Publik, Guru Besar Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Makasar
- Anwas,M Oos.2013.Pemberdayaan Masyarakat Global.Bandung: Alfabeta.
- Arikunto,Suharsimi.2006.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Bandung:Refika Aditama.
- Bogdan,Robert dan Taylor.1992.*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Terjemahan oleh Arief Rurchan.Surabaya:Usaha Nasional.
- Budiardjo,Miriam.2013.Dasar–Dasar Ilmu Politik.
Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Clare, Gunn A. 1988. *Tourism Planning*. New York: Taylor and Francis.
- DunnN.William,2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik.
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Dye,Thomas R.2005. *Understanding Public Policy*. Eleventh Edition,NewJersey:Perason Prentice Hal.
- Edward III,George C.1980.*Implementing Public Policy*.Washington DC:Congressional Quarterly Press.
- Endraswara Suwardi. 2006. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Jakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gde, P., Pitana, P., & Gayatri, G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Andi: Yogyakarta
- Huraerah, Abu.2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bandung. Humaniora

- Jafar, Mohammad. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Utara Publika Institut.
- Jakarta: Rineka Cipta.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khairuddin. 1992. *Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan*. Jakarta: Jambatan.
- Mardikanto, Totok, dan Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA
- Meter, Donal, Vanand Carl E. VanHorn. *The Policy Implementation Process*.
- Meter, Donal, Vanand Carl E. VanHorn. (2008) *The Policy Implementation*
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
- Moleong, Lexy J. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Process. Sage Publication: Beverly Hill.
- Sage Publication: Beverly Hill.

- Sedarmayanti,2012.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:RefikaAditama Eresco.
- Soetomo.2006.Manajemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan. Jakarta:VIDCODATA.
- Sugiyono,2014.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21,Bandung:Alfabeta
- Sugiyono.2014.Metode Penelitian Kombinasi. Bandung:Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.
- Suhendra.2006.Peranan Birokrasi dalam PemberdayaanMasyarakat.Bandung. Alfabeta
- Sumaryadi, INyoman.2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom danPemberdayaan Masyarakat. Jakarta:CitraUtama.
- Suryabrata,Sumadi.2011.*Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suyanto,Bagong dan Sutinah.2005.*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif dan Pendekatan*. Jakarta:Prenada Media
- Tjokrowinoto,Moeljarto.2007.Pembangunan:Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab,Solihin Abdullah.1991.*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara: PT. ElexMedia Komputindo kelompok gramedia.
- Wibowo.2005.Managing Change. P e n g a n t a r Manajemen Perubahan. Bandung. Alfabeta
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MediaPressindo

Tentang Penulis



Prof. Dr. Drs. I Made Sumada, MM., M.Si, Lahir di Tabanan, 31 Mei 1965. Lulusan Sarjana (S1), Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Ngurah Rai Denpasar, Pada 30 Maret 2007 memperoleh gelar Magister Manajemen dan 3 Oktober 2007 memperoleh gelar Magister Sains (Administrasi Publik) pada PPs. Universitas Wiajaya Putra Surabaya pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan S3 di Pascasarjana UNPAD

Bandung dengan Biaya Beasiswa BPPS Dirjen Diktit Depdiknas dan selesai tahun 2015. Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kopertis Wilayah VIII 1 Maret 1985, dan Pindah menjadi Dosen PNS dpk di Universitas Ngurah Rai Denpasar pada Tahun 2000. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 diangkat sebagai Guru Besar Tetap UNR dalam Bidang Pelayanan Publik. Jabatan yang pernah diemban yaitu, Pembantu Dekan I FISIP UNR 2001-2005, Dekan FISIP 2005-2010 , Sekretaris Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar 2008-2013, sebagai Wakil Rektor II dan sekarang tercatat sebagai Dosen pada FISHUM dan MAP PPs. UNR,.

Buku yang pernah ditulis Filsafat Ilmu (2010), Policy Evaluation Applied For School Operational Assistance (2019) dan Kobo di Bali (2021). Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya berjudul Evaluasi Kebijakan BOS pada SMPN di Kabupaten Badung Bali (2015), Menulis pada jurnal internasional bereputasi terindex scopus: Implementation of HIV/AIDS prevention policies-The study in Bali Province, Indonesia (Q2:2023), Future policy implementation

to balance growth and sustainability: Managing the impact of mass tourism in Bali(@2:2024), Policy implementation and strategic effects: Assessing the impact of parliamentary thresholds on Indonesia's political system and governance, serta puluhan hasil penelitian yang telah diterbitkan dalam jurnal baik nasional dan internasional.